

## **INTISARI**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di Desa Krakal Kecamatan Alian dan Desa Pecarikan Kecamatan Prembun serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. PTSL merupakan program nasional untuk percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan program PTSL, pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dapat bersertipikat untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah. Program PTSL ini direncanakan dilaksanakan sampai tahun 2025, dengan target tahun 2017 sebesar 5 juta sertipikat, tahun 2018 sebesar 7 juta sertipikat, tahun 2019 sebesar 9 juta sertipikat dan untuk tahun 2020-2025 target tiap tahun sebesar 10-13 juta sertipikat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Dalam menganalisis partisipasi masyarakat pada desa lokasi penelitian digunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969), yang membagi 8 tingkatan partisipasi masyarakat yaitu : citizen control, delegated power, partnership, placation, consultation, informing, teraphy dan manipulation.

Pada penelitian ini didapatkan perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL di Desa Krakal dan Desa Pecarikan. Tingkat partisipasi warga Desa Krakal dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL lebih tinggi daripada warga Desa Pecarikan. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah perbedaan respon/tanggapan pada setiap tahapan pelaksanaan PTSL, koordinasi dan komunikasi disamping kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakatnya dalam program PTSL ini.

Rekomendasi yang diberikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertipikat tanah, serta meluruskan persepsi-persepsi yang kurang benar di masyarakat tentang sertipikat. Di samping itu diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dan panitia PTSL dalam komunikasi dan koordinasi dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam program PTSL. Dalam penetapan target sertipikat pada lokasi PTSL, Kantor Pertanahan sebaiknya mendasarkan permohonan riil yang sudah terkonfirmasi langsung ke pemohon, pemanfaatan modal sosial masyarakat, tingkat keaktifan masyarakat serta kapasitas kepala desa dan perangkatnya.

Kata kunci : PTSL, partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas kepala desa.

## ABSTRACT

The purpose of this study was to analyse community participation in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) program which was carried out in Krakal Village, Alian District and Pecarikan Village, Prembun District and the factors that influenced it. PTSL is a national program to accelerate land registration throughout Indonesia. The implementation is assigned to the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. By implementing PTSL program, the government aims to certify all land in Indonesia to ensure legal certainty of land ownership. The PTSL program is planned to be implemented until 2025, with goals of million certificates in 2017, 7 million certificates in 2018, 9 million certificates in 2019 and an annual goal of 10-13 million certificates for the year 2020-2025.

A case study approach was employed in this study with qualitative methods. The data was collected by observation, interview, questionnaires and documentation. In analyzing community participation in the research villages, the participation theory used was proposed by Sherry R. Arnstein (1969). The theory divides 8 levels of community participation, namely : citizen control, delegated power, partnership, placation, consultation, informing, therapy and manipulation.

This study found differences of community participation levels in PTSL implementation between Krakal Village and Pecarikan Village. The participation level of Krakal residents at each stage of PTSL implementation was higher than Pecarikan resident. Factors that affect the level of participation were differences in responses at each stage of PTSL implementation, coordination and communication beside the obstacles faced by the village chief in encouraging community participation in the PTSL program.

The recommendations given to increase community participation are making further action to increase the understanding of the importance of land certificates, as well as to correct false perceptions in the community about certificates. In addition, it is necessary to improve the capacity of village chiefs and PTSL committees in communication and coordination. Those actions are done in order to develop community participation in PTSL program. In determining the goal for certificates at PTSL locations, the Land Office should directly base the real application that has been confirmed to the applicant, the utilization of social capital, the activity level of the community, and the capacity of the village chief, as well as the apparatus.

**Keywords :** PTSL, community participation, capacity improvement of village chiefs.